

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara-negara di seluruh dunia memerlukan kemajuan di bidang moneter untuk mendukung gaya hidup dan memberikan bantuan kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, setiap negara harus mengambil langkah-langkah yang mendukung pertumbuhan moneter dan mengubah struktur kegiatan ekonomi, yang disebut sebagai perkembangan ekonomi (Sukirno 2010:423). Ada berbagai tindakan yang dapat diambil untuk mencapai kemajuan moneter dalam suatu negara, salah satunya adalah klaim atas aset yang dimiliki oleh negara atau wilayah setempat tanpa merusak sumber daya ekologi dan dukungan pemerintah daerah, sehingga dapat mencapai pertumbuhan finansial bagi negara.

Dalam era globalisasi, negara harus berinovasi dan melakukan langkah-langkah berani untuk meningkatkan daya saing dengan memperkuat pembangunan nasional. Pengembangan ekonomi tidak hanya terbatas pada sektor riil, tetapi juga melibatkan perubahan dalam kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Peningkatan tingkat pembangunan suatu negara juga sangat bergantung pada kontribusi setiap daerah.

Oleh karena itu, setiap daerah diberdayakan untuk menggali, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi lokalnya, yang disebut sebagai potensi daerah. Pengembangan potensi dalam suatu daerah tidak terlepas dari otonomi daerah atau kebijakan daerah. Negara Indonesia menetapkan potensi daerah dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 9 Tahun 2015, yang dalam kedua Undang Undang tersebut membahas tentang kebijakan tersendiri dalam setiap daerah, bahwa setiap wilayah/daerah dibedakan untuk mengelola urusan pemerintahan di wilayah/daerahnya untuk meningkatkan kualitas wilayah dan menonjolkan wilayah yang memiliki potensi wisata dengan satu tujuan yang sama yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat di setiap daerah. Dalam peraturan Undang-Undang disebutkan bahwasanya suatu daerah memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya

pemerintahan daerah termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan tujuan untuk mensejahterahkan masyarakatnya sehingga tidak bergantung pada pemerintahan pusat. Dalam lingkup kabupaten/kota memiliki kebijakan untuk mengembangkan potensinya supaya bisa bersaing dan memiliki eksistensi dengan kabupaten/kota lainnya. Setiap otonomi daerah mampu menghasilkan pendapatan yang biasanya disebut sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Peningkatan PAD yang saat ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat adalah dari pengembangan potensi sumber daya alam yang dalam penjalanannya diimbangi dengan kebijakan pemerintahan yang ada. Kategori dalam peningkatan PAD salah satunya dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang datang ke suatu daerah yang memiliki potensi wisata.

Pariwisata sendiri memiliki pengertian sebagai suatu kegiatan/aktivitas yang dikerjakan oleh perseorangan maupun grub dalam beberapa hari dari daerah tempat mereka berasal ke daerah lainnya dengan tujuan untuk tidak bermukim/sementara, sedang mencari pekerjaan, namun untuk menghilangkan kejenuhan, untuk berlibur dari kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap hari dan menghabiskan waktu senggang dan juga untuk tujuan lainnya (Meyers, 2009).

Pariwisata merupakan faktor terpenting dalam suatu negara dan daerah. Sektor pariwisata dapat membantu suatu negara maupun daerah akan memperoleh penghasilan dari penerimaan setiap obyek wisata tersebut terutama bagi pendapat asli suatu daerah. Selain pariwisata sebagai pelopor kemajuan ekonomi, juga sebagai penolong dalam memecahkan masalah yang kerap kali terjadi yaitu masalah pengangguran. Dengan adanya pariwisata di suatu daerah membuat peluang pekerjaan tersedia bagi masyarakat dan mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Dan wisata adalah komoditas yang bukan hanya diperlukan oleh suatu daerah melainkan juga diperlukan orang yan tinggal di daerah tersebut, hal itu disebabkan wisata dapat membantu untuk membuat kebosanan dan belajar untuk lebih mengenal sejarah dari daerah dan juga menjadi sarana untuk belajar berbisnis bagi masyarakatnya (Austriana, 2005) dengan asumsi bahwa tujuan dari pariwisata adalah untuk meningkatkan pendapatan devisa suatu daerah (Handayani, 2013).

Pariwisata saat ini adalah satu aspek yang sedang gencar dimajukan oleh negara-negara di dunia, dan Indonesia merupakan salah satunya, sebab dengan memajukan sektor pariwisata Indonesia bisa mendapatkan tambahan pemasukan devisa untuk negara. Pariwisata sendiri merupakan industri yang baik terhadap dampak lingkungan atau pariwisata sering disebut sebagai industri non-polusi, jika dibandingkan dengan industri lainnya yang cenderung lebih banyak menghasilkan polusi dalam proses berjalannya dan lebih berperan aktif dalam pemanasan global yang terjadi saat ini.

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya, seperti aneka ragam flora & fauna, tinggalan zaman kuno, tinggalan histori, serta kesenian dan kebudayaan yang memiliki daya jual tinggi untuk perkembangan daerah sebagai industri pariwisata. Terdiri dari berbagai pulau yang memiliki keindahan dan potensi masing-masing menjadikan peluang Indonesia sebagai negara dengan daya saing pariwisata tinggi semakin bisa dibanggakan. Pariwisata di Indonesia dijelaskan secara rinci, 439 Museum, 20 Taman Budaya, 176 Cagar Budaya, 488 Desa Adat dan 2.228 Komunitas Budaya menjadikan Indonesia sebagai negara budaya. Dengan beragam kebudayaan memunculkan berbagai destinasi wisata yang mengundang wisatawan lokal dan juga asing untuk berkunjung ke Indonesia. (dikutip dari laman *publikasi.data.kemendikbud.go.id* yang diakses pada tanggal 10 November 2022). Dengan adanya modal tersebut sangat memungkinkan Indonesia menjadi negara dengan pemasukan devisa besar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika sumber daya alam yang dijadikan industri pariwisata dikelola dengan baik dan secara maksimal. Sebab industri pariwisata memiliki peran yang besar dalam pemasukan devisa negara sehingga mendorong terbentuknya satu sistem yang melakukan perhatian khusus terhadap pariwisata di Indonesia dan juga sebagai nilai jual untuk bersaing bagi pemerintah daerah.

Indonesia merupakan negara dengan nilai sejarah yang kuat, oleh karenanya di Indonesia banyak terdapat wisata yang berbasis peninggalan sejarah. Hal tersebut dikuatkan dengan data yang dipublikasikan oleh *publikasi.data.kemendikbud.go.id* bahwa ada 439 Museum dan 176 cagar

budaya yang keduanya merupakan hasil dari peninggalan sejarah. Dengan melihat pesatnya pertumbuhan pariwisata *heritage* di Indonesia, perlu dilakukan penanganan khusus yang bertujuan untuk mendukung dan memastikan kelangsungan pariwisata guna meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat lokal. Hal ini harus dilakukan dengan memprioritaskan dan melestarikan unsur lokalitas dari masyarakat setempat serta tetap menjaga keberadaan unsur budayanya. Dengan demikian, pariwisata dapat dijalankan secara sistematis, terintegrasi, dan memiliki karakter multikultural.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan terdapat penjelasan bahwa : “Keadaan alam, flora dan fauna sebagai karunia Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan kepariwisataan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepangan nasional.”

Salah satu daerah yang memiliki potensi pariwisata tinggi adalah Pulau Madura. Pulau yang terletak di sebelah utara pulau Jawa dan masih masuk dalam kawasan wilayah Jawa Timur dikenal sebagai daerah yang memiliki berbagai macam jenis destinasi wisata, dengan banyaknya sumber daya alam menjadikan Madura sebagai salah satu daerah yang dikenal dengan berbagai macam wisatanya. Pulau Madura sendiri terbagi menjadi 4 Kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Sumenep dan Pamekasan. Salah satu kabupaten yang memiliki daya tarik lebih di sektor pariwisata adalah Kabupaten Bangkalan. Kabupaten Bangkalan memiliki luas wilayah total sekitar 1.260 km. Wilayah tersebut terbagi dalam 18 kecamatan, 8 kelurahan, dan 273 desa. Terletak di bagian paling selatan pulau Madura dengan menjadi kabupaten pertama yang

dari jembatan Suramadu menjadikan Bangkalan sebagai daerah di pulau Madura yang sangat mudah diakses. Maka dengan kondisi geografis yang demikian menjadikan kabupaten Bangkalan sangat berpotensi sebagai pusat wisata di pulau Madura, ditambah lagi di kabupaten Bangkalan terdapat banyak sekali peninggalan dari leluhur di Madura yang masih terawat hingga saat ini. Dalam sektor pariwisata, Kabupaten Bangkalan terbagi menjadi 5 (lima) sektor pariwisata, kelima sektor tersebut antara lain : 1) wisata budaya, 2) wisata alam, 3) wisata religi, 4) wisata kuliner, 5) wisata *heritage*. Kelima sektor pariwisata tersebut menjadikan Kabupaten Bangkalan sebagai kabupaten yang memiliki daya saing wisata dengan kabupaten lainnya di seluruh Indonesia.

Kabupaten Bangkalan merupakan daerah yang memiliki nilai sejarah tinggi sehingga terdapat banyak peninggalan sejarahnya. Salah satu peninggalan sejarah yang sampai saat ini masih berdiri kokoh adalah Mercusuar Sembilangan yang terletak di jalan Sembilangan, Socah, Slempit, Pernajuh, Kec. Bangkalan. Mercusuar ini dibangun sejak tahun 1879 pada zaman pemerintahan Z.M. Willem III, saat ini mercusuar tersebut masih aktif namun bukan sebagai petunjuk kapal melainkan tempat wisata terutama bagi kaum milenial. Kemudian selain Mercusuar Sembilangan, terdapat lagi wisata peninggalan sejarah berupa kapal Sarimuna Syaikhona Kholil yang terletak di Kecamatan Tanjung Bumi, kemudian ada berbagai makam sejarah yang merupakan makam orang-orang terdahulu yang memiliki peran penting dalam masa kerajaan Cakraningrat Bangkalan seperti makam Syaikhona Kholil, makam Agung Arosbaya, dan masih banyak lagi wisata heritage (warisan) yang masih eksis hingga saat ini di Kabupaten Bangkalan. Melihat banyaknya wisata heritage ini mengharuskan adanya perhatian khusus untuk eksistensi wisata wisata tersebut, maka diperlukan pihak yang memiliki kewenangan untuk menjaga dan melestarikan wisata serta juga mempopulerkan wisata tersebut kepada khalayak umum untuk menarik perhatian mereka sehingga mereka mau untuk berkunjung. Merupakan satu hal yang penting untuk dilakukan bersama dengan mempopulerkan dan melestarikan wisata *Heritage*

Dalam hal ini pihak pemerintahan Kabupaten Bangkalan menjadi garis terdepannya. Dan pelaksana dari pemerintah Kabupaten Bangkalan di bidang

pariwisata dan budaya adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, mereka memiliki tanggung jawab besar terhadap pariwisata yang ada di Bangkalan, terutama dalam hal pengelolaan dan mempopulerkannya. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten (Disbudpar) Bangkalan sangat penting dalam menangani dan mengelola pariwisata di wilayah tersebut. Sesuai dengan tugas dan fungsi Disbudpar sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan pelestarian budaya di daerah kerjanya, mereka memiliki wewenang untuk memberikan izin-izin dalam bidang pariwisata, termasuk izin usaha pariwisata dan Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP). Wewenang ini menjadi landasan bagi perkembangan pariwisata yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Penting untuk dicatat bahwa peran dalam pelestarian dan pengembangan destinasi wisata tidak hanya terletak pada pemerintah, namun juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat Bangkalan. Dengan bersinergi dan berinovasi, komponen masyarakat di desa pengelola wisata berkontribusi dalam memelihara dan menjaga keberlanjutan destinasi wisata. Dengan demikian, upaya pelestarian destinasi wisata menjadi lebih efektif dan berkesinambungan.

Melalui pola komunikasi dapat diketahui bahwa pemerintah bisa mendapatkan masukan dari masyarakat sekitar untuk sedini mungkin menghindari miskomunikasi antara pihak pemerintah (Disbudpar) dan masyarakat sekitar destinasi wisata. Terjadinya miskomunikasi menyebabkan semua perencanaan yang sudah disusun dengan sebaik mungkin tidak akan terlaksana dengan maksimal, sebab keinginan pemerintah melalui kebijakannya tidak selaras dengan kondisi yang terjadi dilapangan. Hal tersebut sangat mungkin terjadi karena ketidak pahaman masyarakat dan ketidak mampuan mereka dalam menerjemahkan informasi dari pemerintah. Maka dalam hal ini komunikasi memiliki peran yang sangat penting apalagi pariwisata menyangkut keperluan banyak orang.

Setelah terjalinnya komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar wisata, langkah selanjutnya adalah menjalin komunikasi dengan masyarakat luar untuk memperkenalkan destinasi wisata dan mengundang mereka untuk datang berkunjung. Dalam hal ini, peran penting dimiliki oleh pihak pemerintah daerah

(Disbudpar) dan masyarakat sekitar untuk melakukan promosi dan memasarkan destinasi wisata mereka kepada masyarakat luar. Promosi menjadi sangat penting karena sektor pariwisata mengalami perkembangan yang pesat dengan tingkat persaingan yang ketat (Rachmayanti & Nofharina, 2018).

Berdasarkan gagasan tersebut, Disbudpar Bangkalan harus bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk tidak mengabaikan pentingnya promosi. Promosi yang dilakukan dengan efektif terbukti mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan (Wolah, 2016). Dengan saling bersinergi, pihak Disbudpar dan masyarakat sekitar dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam mempromosikan destinasi wisata daerah mereka dan menarik minat wisatawan untuk datang mengunjungi.

Menurut Korel & Amstrong, Indikasi tercapainya komunikasi yang efektif apabila khalayak tepat pada sasarannya, tujuannya tercapai, pesan tersampaikan, sumber pesan yang konkrit dan biaya promosi yang memadai untuk menjalankan rencana promosi wisata (Rachmayanti&Nofharina, 2018). Dampak dari keberhasilan promosi yang dilakukan Disbudpar Bangkalan adalah dengan naiknya intensitas kunjungan wisatawan terhadap destinasi wisata yang di promosikan, hal ini dapat direalisasikan dengan menggunakan media serta pola komunikasi yang tepat.

Jika tidak dilakukan pengelolaan yang tepat, maka wisata *heritage* di Bangkalan akan menjadi susah untuk dikenal dan informasi yang terkait juga tidak tersampaikan kepada masyarakat luas. Disbudpar Bangkalan memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan dan upaya popularisasi wisata *heritage* di Bangkalan, oleh karena itu diperlukan upaya yang maksimal dengan runtutan proses yang tersusun baik sehingga menghasilkan sebuah pola komunikasi yang efektif dilakukan untuk mempopulerkan wisata *heritage*, sehingga Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pola komunikasi yang digunakan oleh pihak Disbudpar Bangkalan dalam upaya mempromosikan destinasi wisata Heritage di Kabupaten Bangkalan kepada khalayak umum. Tujuan dari promosi ini adalah untuk menarik perhatian dan minat masyarakat agar bersedia berkunjung ke destinasi tersebut, sehingga

dapat memberikan dampak positif berupa pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat lokal dan Kabupaten Bangkalan secara keseluruhan.

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi untuk penelitian sebelumnya yang memiliki tema dan pembahasan serupa. Dengan begitu, kesimpulan akhir dari penelitian ini akan menjadi lebih komprehensif dan menyeluruh. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya popularisasi pariwisata di Kabupaten Bangkalan, khususnya destinasi wisata Heritage sehingga membuatnya menjadi lebih dikenal oleh masyarakat luas dan juga untuk membantu pihak Disbudpar dalam merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dalam upaya mempromosikan destinasi wisata *heritage*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

Bagaimana pola komunikasi pariwisata Disbudpar Bangkalan dalam upaya mempopulerkan destinasi wisata *heritage* di Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pola komunikasi pariwisata yang dilakukan oleh Disbudpar Bangkalan dalam upaya mempopulerkan wisata *heritage* di Bangkalan

1.4 Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah disebutkan diatas maka diharapkan bisa memberikan manfaat, antara lain :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi dalam pengembangan dunia pendidikan dalam bidang ilmu komunikasi. Dan juga menjadi bahan kajian lanjutan dan tambahan informasi ilmiah sehingga bisa menjadi bahan literatur untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa menjadi pertimbangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bangkalan dalam upaya mengkomunikasikan pariwisata kepada khalayak umum dengan lebih efektif dan efisien